

**LAPORAN POKOK-POKOK PELAKSANAAN
TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG
MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
TAHUN 2019**



PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA

DAFTAR ISI

Laporan Pelaksanaan Good Governance PT BPR Mitrasembada Bandung	3
Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung	3
Dasar Hukum.....	3
I. Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.....	3
1. Informasi Umum BPR sesuai dengan kondisi terkini	3
1.a. Struktur Organisasi.....	4
1.b. Formasi sumber daya manusia pada setiap unit kerja, pendidikan dan lama masa jabatan pada posisi saat ini, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris.....	5
1.c. Ketentuan intern yang telah dimiliki dan tanggal pemberlakuan.....	5
2. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan di BPR.....	7
2.a. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja BPR	7
2.b. Penerapan Fungsi Kepatuhan	8
2.c. Pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti BI, PPATK, dan LPS.....	9
II. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Berdasarkan Hasil Self Assessment	10
a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi	10
a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.....	10
a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi	10
1) Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris.....	11
2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi	11
a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris	11
b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite-komite.....	11
c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.....	12
c.1. Fungsi Kepatuhan.....	12
c.2. Audit Intern	12
c.3. Audit Ekstern	12
c.4. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Audit Intern,dan Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko	13
d. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BPMK	13
e. Rencana Strategis Bank.....	13
e.1. Rencana jangka pendek tahun 2020	13
e.2. Rencana jangka menengah tahun 2020	14
f. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	15
3. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.....	15
4. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	15
5. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	16
6. Share Option	17
7. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah	17
8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	17
9. Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud)	17
10. Permasalahan Hukum.....	17
11. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	17
12. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik	18

Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance	18
Summary Perhitungan Nilai Komposit Persiapan Self Assesment GCG Desember 2018 PT BPR Gunadhana Mitrasembada	19



LAPORAN POKOK-POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA BANDUNG TAHUN 2019

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT BPR Gunadhana Mitrasembada pada tahun 2019 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode 02 Januari sampai dengan Desember 2019.

Dasar Hukum

Penyusunan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di PT BPR Gunadhana Mitrasembada adalah :

1. Undang-undang
 - a. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007.
 - b. UU RI NO. 10 TAHUN 1998 Tentang Perubahan UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 / POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.
3. Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No. 05/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.

I. Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, yang mencakup:

1. Informasi Umum BPR sesuai dengan kondisi terkini :

- a. Struktur Organisasi
- b. Formasi Sumber Daya manusia
- c. Ketentuan Intern yang telah dimiliki dan tanggal mulai diberlakukan

2. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan di BPR :

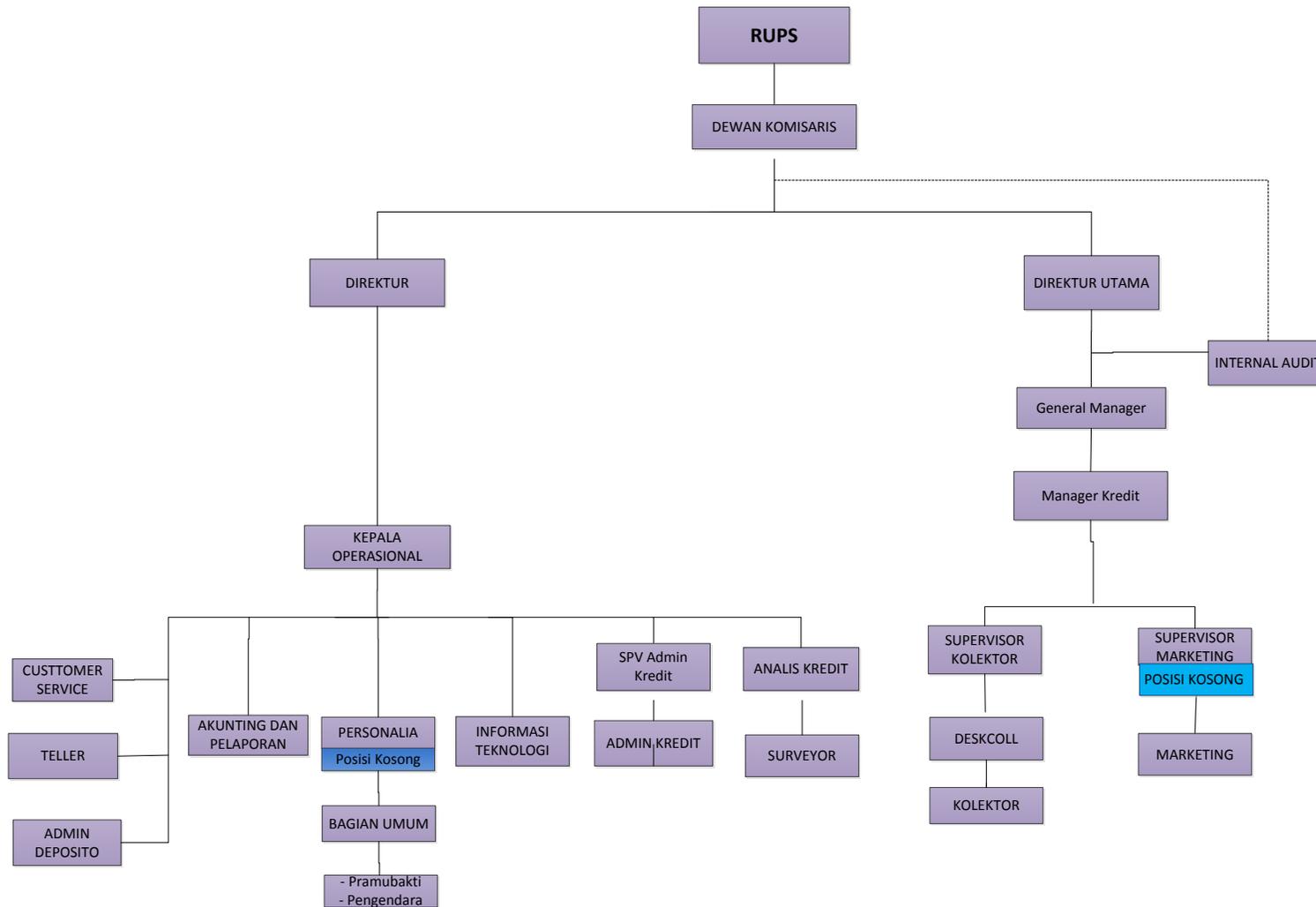
- a. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan
- b. Penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja BPR
- c. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk penjelasan atas upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan
- d. Pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti BI, PPATK, dan LPS.

1. Penjelasan Informasi Umum BPR, adalah sebagai berikut :

Ad. 1.a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. BPR Gunadhana Mitrasembada yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No : No. 04/SK-DIR/GM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang mulai diberlakukan pada tanggal yang sama tersusun sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA**



Ad.1.b. Formasi sumber daya manusia pada setiap unit kerja, pendidikan, dan lama masa jabatan pada posisi saat ini, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris

Formasi SDM PT BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung

Periode : 31 Desember 2019

No	Unit Kerja	Jumlah (orang)	Nama	Jabatan	Pendidikan	Lama Jabatan
1	Dewan Komisaris	1	Tjutju Samsudin	Komisaris Utama	SLTA	10 Tahun
2	Komisaris	1	Meggy Roumimper	Komisaris	S2	10 Tahun
3	Direksi	1	Cecilia Hansel	Direktur Utama	S1	13 Tahun
4	Direksi	1	Endah S Lestari	Direktur	DIII	2 Tahun
5	Internal Audit	1	Eli Herliana	Audit Internal	SLTA	1 Tahun
6	Operasional	1	Erwin Nugraha	Operasional	S1	1 Tahun
5	Perkreditan	1	Sugiharto	Manager Kredit	S1	2 Tahun
6	Administrasi Kredit	1	Susan Herlina	Supervisor Administrasi Kredit	S1	18 Bulan
8	Penagihan	1	Hendra Irmanto	Supervisor Penagihan	S1	15 Bulan

Ad. 1.c. Ketentuan intern yang telah dimiliki dan tanggal pemberlakuan.

➤ **DI BIDANG PERKREDITAN**

No	Item	Nomor Memorandum/SE	Mulai Diberlakukan	Keterangan
1	Kebijakan Produk Kredit	002/M/DIR/III/2019	21 Maret 2019	
2	Pedoman Perkreditan (PKPB)	Kebijakan	06 Maret 2020	Update Profesionalisme & Integritas Pjb Kredit
3	Ketentuan Perkreditan	001/DIR/GM/IV/2019	02 Mei 2019	Biaya Administrasi Kredit
4	Ketentuan Perkreditan	02/DIR/GM/VI/2019	14 Juni 2019	Update Harga Taksasi
5	Ketentuan Target Kredit	01/DIR/GM/VII/2019	2 Juli 2019	
6	Ketentuan Collection	02/M-DIR/VIII/2019	26 Agustus 2019	Pembinaan Debitur
7	Kebijakan Produk Kredit	01/M/DIR/XII/2019	16 Desember 2019	Update Produk Kredit Karyawan
8	Ketentuan Perkreditan	03/DIR/GM/XII/2019	23 Desember 2019	Biaya Fidusia

➤ **DI BIDANG PENDANAAN**

No	Item	Nomor Memorandum/SE	Mulai Diberlakukan	Keterangan
1	Ketentuan Insentif Deposito	004/M-DIR/V/2019	27 Mei 2019	Update
2	Ketentuan Suku Bunga Deposito	003/M-DIR/V/2019	01 Juni 2019	Update
3	Ketentuan Suku Bunga Tabungan	02/M-DIR/VII/2019	31 Juli 2019	Update

➤ **DI BIDANG OPERASIONAL**

	Item	Nomor Memorandum/SE	Mulai Diberlakukan	Keterangan
1	Ketentuan Pemegang kunci Khasanah	001/DIR/GM/2019	9 Januari 2019	Update 2 oktober 2019
2	Ketentuan Pembebanan biaya	001/DIR/GM/V/2019	9 Mei 2019	
3	Ketentuan Kode Transaksi	002/DIR/GM/V/2019	13 Mei 2019	Update 17 Desember 2019

➤ **DI BIDANG MANAGEMEN**

	Item	Nomor Memorandum/SE	Mulai Diberlakukan	Keterangan
1	Kebijakan ketentuan Penunjukkan Otorisasi tambahan	Memo Internal	10 Januari 2019	
2	Ketentuan Penandatanganan Buku Tabungan	Surat Keputusan no.05/SK-DIR/GM/III/2019	18 Maret 2019	
3	Ketentuan Perubahan Jam Kerja	Pemberitahuan	1 April 2019	
4	Ketentuan Penandatanganan Bilyet Deposito	Surat Kuasa 003/BPR/GM/IV/2019	1 April 2019	Update 19 September 2019
5	Ketentuan Layanan Payment Point Online Bank	Surat Keputusan 001/Sk-DIR/GM/V/2019	10 Mei 2019	
6	Tata Tertib Penggunaan Kendaraan Inventaris	01/M-DIR/VIII/2019	5 Agustus 2019	
7	Pencabutan wewenang Otorisasi	Surat Keputusan 002/Sk-DIR/GM/XI/2019	26 November 2019	Update

2. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan di BPR

Ad.2.a Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja BPR terkait, mengenai peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang terkini dan relevan

Daftar pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan BPR tahun 2019

No	Tanggal Pelaksanaan	Materi	Peserta	Peyelenggara	Tempat
1	10 Januari 2019	Pelatihan Review & Pengawasan RBB	Direktur Utama, Komisaris dan Staf IT	Zpro Consulting	Jakarta
2	11 Januari 2019	Training of Trainer	Direktur	LPM Aster Expert	Bandung
3	29 Januari 2019	Training Strategi Pemasaran dan Penetrasi Pasar	Seluruh Staf dan Pengurus	PT. Kalpata Mandiri Konsultama	Bandung
4	19 Maret 2019	Pelatihan Perpajakan SPT Pph Badan	Staf Akunting	Perbarindo	Bandung
5	24 April 2019	Seminar Communication Selling	Marketing & Direktur	James Gwe	Bandung
6	29 April 2019	Traianing Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah	Seluruh Staf dan Pengurus	LPM Aster Expert	Bandung
7	23 Mei 2019	Pelatihan ESQ	Staff	Perbarindo	Bandung
8	27 Mei 2019	Pelatihan APU PPT	Seluruh Karyawan dan Pengurus	LPM Aster Expert	Bandung
9	11 Juni 2019	Sosialisasi Fitur LBBPR Versi OJK	Kepala Operasional dan Staf IT	PT Sinergi	Jakarta
10	19 Juli 2019	Serifikasi Komisaris	Direktur Utama	Perbarindo	Bandung
11	26 Juli 2019	Training Menciptakan Layanan Prima	Seluruh Karyawan dan Pengurus	PT. Kalpata Mandiri Konsultama	Bandung
12	1 Agustus 2019	Training Be Innovative and Be Professional To Achieve Target	Manager dan Kepala Operasional	OJK	Bandung
13	9 Agustus 2019	Pelatihan Audit Intern dan Audit Teknologi Informasi	Auditor & Staf IT	ZPro Consultan	Jakarta
14	22 Agustus 2019	Pelatihan Aset Produktif dan Kebijakan Perkreditan	Auditor	Perbarindo	Bandung
15	30 Agustus 2019	Manajemen Perkreditan dan Analisis Kredit	Staf dan Pengurus	LPM Aster Expert	Bandung
16	9 September 2019	Pelatihan RBB 2020	Direktur dan Kepala Operasional	ZPro Consulting	Jakarta

17	27 September 2019	Pelatihan Implementasi Manajemen Risiko & Laporan Profil Risiko BPR	Seluruh Staf dan Pengurus	PT. Talent Indonesia	Bandung
17	25 Oktober 2019	Sosialisasi PKPB ttg KAP dan PPAP BPR pada POJK NOMOR 33 /POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR	Seluruh Staf dan Pengurus	LPM Aster Expert	Bandung
18	25 Oktober 2019	Pelatihan Pengawasan RBB	Komisaris dan Staf IT	ZPro Consulting	Jakarta
19	10 November 2019	Pelatihan Sertifikasi & Uji Kompetensi Audit Internal Bank	Auditor	LPM Aster Expert	Bandung
20	13 Desember 2019	Pelatihan Profil Risiko	Kepala Operasional	PT. Talent Indonesia	Bandung
21	31 Desember 2019	Sosialisasi Kinerja karyawan tahun 2019 dan RBB 2020	Seluruh Karyawan dan Pengurus	Direksi	Bandung

Sosialisasi dilakukan secara berkesinambungan dan akan selalu menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang baru berlaku dan relevan.

Ad.2.b. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja BPR termasuk rencana penyesuaian ketentuan intern yang belum sesuai dengan ketentuan dan pemenuhan struktur organisasi/sumber daya manusia.

IDENTIFIKASI KETENTUAN DI MASING-MASING UNIT KERJA DI BIDANG PENGHIMPUNAN DANA

No	Item Ketentuan	Ketidak sesuaian	Rencana penyesuaian ketentuan intern	Pemenuhan struktur Organisasi
1	Pedoman Penghimpunan dana (Tabungan, Deposito, ABP)	Pelaksanaan program APU/PPT	Komposisi petugas	Perubahan struktur pegawai PIC APU/PPT
2	Memorandum Direksi tentang Tingkat suku bunga Deposito	Penetapan tingkat suku bunga DPK	Menurunkan tingkat sk bunga dibawah LPS	Tidak ada perubahan petugas bidang dana

I. PENYALURAN DANA

No	Item Ketentuan	Ketidaksesuaian	Rencana penyesuaian ketentuan intern	Pemenuhan struktur Organisasi
1	Memorandum Direksi tentang Tingkat suku bunga kredit	Penetapan tingkat suku bunga kredit	Menurunkan Tingkat suku bunga	Tidak ada perubahan petugas bidang penyaluran dana

Ad.2.c. Pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti BI, PPATK, dan LPS

DAFTAR KOMITMEN BANK KEPADA LEMBAGA-LEMBAGA TERKAIT :

No	Lembaga	Dasar Komitmen	Materi komitmen	Perkembangan Penyelesaian
1	OJK	Hasil pemeriksaan umum tahun tahun 2019	Pemenuhan permodalan	Telah dipenuhi
2	OJK	Hasil pemeriksaan umum tahun tahun 2019	Penunjukkan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Resiko	Telah dipenuhi
3.	OJK	Hasil pemeriksaan umum tahun tahun 2019	Pelaksanaan Hapus Buku Kredit	Telah dilaksanakan
4	OJK	Hasil pemeriksaan umum tahun tahun 2019	Denda pelaporan bulanan	Telah diselesaikan
5	OJK	Hasil pemeriksaan umum tahun tahun 2019	Koreksi perhitungan PPAP	Telah dipenuhi
6	OJK	Hasil pemeriksaan umum tahun tahun 2019	Penunjukkan Pejabat PE APU & PPT	Telah dipenuhi
7	OJK	Hasil pemeriksaan umum tahun tahun 2019	Koreksi Laporan Bulanan	Telah diselesaikan

II. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi.

a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Tjutju Samsudin
 - Komisaris : Meggy Roumimper
3. Direksi dipimpin oleh direktur utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Cecilia Hansel, S.Sos
 - Direktur : Endah Sri Lestari
4. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
5. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhannya, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Eksternal, Bank Indonesia dan pengawas Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam

operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2). Tugas dan Tanggung jawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham melalui RUPS.

a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Persetujuan Pembagian tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama.
- Persetujuan RBB tahun 2020

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite-komite

Sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015, BPR yang telah memiliki Modal Inti sebesar Rp.80.000.000.000,- wajib memiliki komite-komite Audit, komite pemantau resiko dan komite remunerasi. PT. BPR Gunadhana Mitrasembada belum memiliki Modal Inti sebesar yang ditentukan dalam POJK No.4/POJK.03/2015, maka PT. BPR Gunadhana Mitrasembada belum memiliki komite-komite tersebut.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

c.1. Fungsi Kepatuhan

- Penunjukkan Direktur utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang secara berkala melaporkan ke Dewan Komisaris.
- Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dalam pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c.2. Audit Intern

- Bank memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang telah memiliki pedoman kerja sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sebagai auditor intern sesuai peraturan perundang undangan yang telah disetujui oleh Direktur utama dan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur utama.

c.3. Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- Penunjukkan KAP belum melalui keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

c.4. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Audit Intern, dan Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko

Sesuai dengan POJK diatas mengenai pemenuhan tata kelola BPR, maka bank telah membentuk Pejabat Eksekutif Audit Intern dan akan membentuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan, dan Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko.

d. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BPMK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BPMK dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BPMK PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung.
4. Penyediaan dana kepada Pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala laporan BPMK kepada Bank Indonesia.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	3	324.348
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	11.002.753
	b. Group	0	0

e. Rencana Strategis Bank

e.1. Rencana jangka pendek tahun 2020

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020.

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah dengan melaksanakan peningkatan penagihan oleh petugas penagihan.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Pengembangan kredit pada produk baru.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung jangka pendek difokuskan pada penyehatan rasio-rasio tingkat kesehatan bank, peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat

sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung.
- Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga difokuskan deposito berjangka dan tabungan dengan bunga yang kompetitif namun diselaraskan dengan kondisi rasio LDR BPR.
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan intern agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.
- Secara terus-menerus memperbaiki rasio-rasio tingkat kesehatan bank untuk memperbaiki rasio NPL sehingga rasio permodalan semakin membaik.
- Menurunkan rugi secara bertahap dengan cara memperkecil biaya maupun menambah pendapatan.
- Berupaya memperoleh laba bulanan pada laporan keuangan.

e.2. Rencana jangka menengah tahun 2020

1) Finansial

- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM.

- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung.

3) Karyawan

- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung melalui *Competency Base human Resources Management*.
- Meningkatkan kemampuan SDM melalui pembekalan pelatihan yang berkesinambungan.

f. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
2. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.
4. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
5. PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung.

3. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung tidak ada yang memiliki saham pada PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung, dan tidak memiliki saham pada Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

4. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung, merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan

dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

5. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp 697 juta sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp 30 juta terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll)	1	Rp 149,5 juta	2	Rp 547,9 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dana pensiun, dll) yang tidak dapat dimiliki	1	Rp 6.3 juta	2	Rp 24 juta

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		

Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	1 orang

6. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

7. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 1,36 %
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 80,73 %
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 100 %

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun.

9. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Selama tahun 2019 tidak terjadi penyimpangan / kecurangan internal bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung.

10. Permasalahan Hukum

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung selama tahun 2019.

11. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

12. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada tahun 2019 PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung tidak melakukan pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dan tidak terdapat pemberian dana untuk kepentingan politik.

Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance.*

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung periode Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar **1.93** dengan predikat Baik
- b. Kekuatan Pelaksanaan GCG
 - Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
 - Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
 - Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung tahun buku 31 Desember 2018.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Bandung, 31 Maret 2020

PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung


Endang Sri Lestari
Direktur

Mengetahui,


Cecilia Hansel, S.Sos
Komisaris Utama


Meggy Roumimper
Komisaris

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2018
PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung**

NO	Aspek Yang Dinilai	Sebelum Manj Resiko	Setelah Manj Resiko	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	0.33	0.30	Jumlah direksi belum sesuai dengan POJK, anggota direksi masih satu orang yang juga membawahi fungsi kepatuhan
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	0.26	0.24	Jumlah anggota dewan komisaris tidak melampaui jumlah anggota direksi telah sesuai ketentuan . Seluruh anggota dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk masa perpanjangannya sebelum berakhir masa jabatan.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00	0.00	Pelaksanaan tugas Komite belum berjalan secara efektif, dikarenakan belum membentuk komite Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0.23	0.21	BPR telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis mengenai benturan kepentingan untuk mengikat pengurus BPR, dan tidak terjadi dalam hal adanya kebijakan direksi.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	0.28	0.25	BPR telah menunjuk dan membentuk direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.26	0.23	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern mengundurkan diri pada bulan Maret sehingga mulai bulan April sampai Desember BPR tidak memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern

7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0.05	0.04	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0.00	0.20	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan OJK, telah dilakukannya penetapan limit credit.
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	0.17	0.15	BPR telah memiliki kebijakan yang memadai terkait dengan BMPK sesuai dengan ketentuan OJK. Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.
10	Rencana Bisnis BPR	0.17	0.15	RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komiaris. RBB belum menggambarkan rencana strategis jangka panjang, hanya menggambarkan rencana bisnis 1 tahun kedepan sesuai dengan ketentuan OJK.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	0.17	0.15	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan OJK. Dan laporan tahunan BPR yang memuat informasi umum mengenai laporan public dan telah sssuai dengan ketentuan OJK
Nilai Komposit		1.92	1.93	Baik